



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana

Q

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja

Walikota terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Renja-PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2024 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024;
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024;
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

2

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Agustus 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

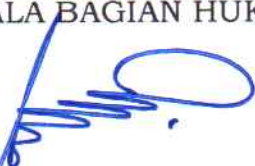
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (2), Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pada pasal 33 ayat (3), bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, didalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2024 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2024, berpedoman pada RPJMD dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, Renstra Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tahun 2020-2024, Renstra Biro Organisasi serta Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;

18. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan

Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX) yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga

Kerja Kota Blitar Tahun 2024 juga berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian Koperasi dan UKM serta Renja Kementerian Ketenagakerjaan) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja KemenkopUKM, Renja Kemenaker, Renja DinkopUKM Jatim dan Renja Disnakertrans Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024. Sedangkan RKA Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
 20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
 32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
 34. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).

35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 19);
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud, menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- b. Sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2025. |
| BAB V | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024. |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Rencana Kerja atau Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Oleh karena itu dalam hal evaluasi perlu memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antara kinerja renja dengan renstra perangkat daerah periode berjalan.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan yang telah berkesinambungan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2022 dengan mengacu pada APBD Tahun 2022 untuk selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ;
8. Program Pengembangan UMKM;
9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
10. Program Penempatan Tenaga Kerja;
11. Program Hubungan Industrial.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kota Blitar

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
					Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72	%		70	69,53	99	70,50	70	97
					Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	90	%		80	66	82,5	82	82	91
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	50	%		46	56	121,74	47	47	94
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	89	%		82	82	101,22	83	83	93
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	650	orang		450	466	103,56	175	175	27
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83	%		77	90	116,88	79	79	95
						Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	20	%		0	0	-	14	14	70
					Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	900	orang		170	289	170	150	150	17
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300	orang		150	150	100	150	150	50
					Pengelolaan Informasi	Persentase pencari kerja	37,1	%		0	45	-	32,7	32,7	88

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
					Pasar Kerja	yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja									
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	390	orang		0	0	-	0	0	-
					Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	174	orang		30	10	33	30	30	17
					Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan									
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100	%		100	90	90	100	100	100
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	350	perusahaan		55	55	100	75	75	21
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20	perkara					5	5	25
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	14	perkara		1	1	100	0	0	-

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
					(satu) Daerah Kabupaten/Kota										
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12	Asosiasi dan serikat pekerja					4	4	33
					Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah									
					Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif									
					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	26	%		22	22	100	23	23	88
					Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	15	Unit usaha		3	3	100	3	3	20
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	Unit usaha	30	10	10	100	10	10	25
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	38,5	%		36	36	100	36,4	36,4	95
					Pendidikan dan Latihan	Persentase koperasi yang	5	%		5	5	100	5	5	100

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
		Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	mengirimkan peserta pelatihan							
		Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200	orang	40	40	100	50	25
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKM yang menjadi peserta pelatihan	38,5	%			36,4	36,4	95
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	610	orang			160	160	26
		Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi							
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	37	%	33	33	100	34	92
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	32	%	28	28	100	29	91
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	320	Unit usaha	80	80	100	50	16

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
						Kabupaten/Kota									
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	33	%		29	29	100	30	30	91
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	100	%		100	100	100	100	100	100
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	400	Unit usaha		100	100	100	100	100	20
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	40	%		32	62	192	34	34	85
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	15	%		11	62	559	12	12	80
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120	orang		30	30	100	30	30	25
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	40	keluarga					10	10	25

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
					Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
					Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan WUB									
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha	2	%		1,8	0,95	52,57	1,85	1,85	93
						Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,6	%					2,3	2,3	88
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100	%		100	37	37	100	100	100
						Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100	%					100	100	100
					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12000	Unit usaha					12000	12000	100
					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	200	Unit usaha		25	25	100	50	50	25

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
						Kemitraan Usaha Mikro									
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	orang		75	75	100	25	25	25
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200	orang					50	50	25
						Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2	%					1,85	1,85	93
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Wira Usaha Baru yang berhasil dikembangkan	2	%		0	1,16	-	1,7	1,7	85
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan Pendampingan	100	%		100	100	100	100	100	100
					Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	400	Unit usaha		100	100	100	100	100	25
					Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar									
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari									

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
						Inspektorat Daerah Kota Blitar									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	indeks	0	81	82,93	102	81,5	81,5	100
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	5	2	2	100	5	5	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	5	3	3	100	4	4	100
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	94	94	100	100	100
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	Orang/bulan	21	23	27	117	27	27	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	12	laporan					12	12	100

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
						SKPD									
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	0	100	98	98	100	100	100
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket					2	2	100
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	orang	100				50	50	100
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	0	100	99	99	100	100	100
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	15 komponen	15 komponen	100	1	1	100
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	2	2	2	100	3	3	100
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	1	12 jenis	12 jenis	100	1	1	100
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	paket		29 jenis	29 jenis	100	10	10	100
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	8 jenis	8 jenis	100	1	1	100
					Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan	12	dokumen	24	24	24	100	12	12	100

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
					dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				eksemplar	eksemplar				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	17	17 rakor	17 rakor	100	12	12	100
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen					0	-	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100	%	0	100	100	100	100	100	100
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	4	4 rekening	4 rekening	100	12	12	100
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan					12	12	100
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	%					100	100	100
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit					0	0	-
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	unit					25	25	100
					Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan	13	unit					3	3	100

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	1	2	3
					Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan									
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit					0	0	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	6				0	0	-
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	0	100	100	100	100	100	100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	13	13	13	100	10	10	100
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	unit					0	0	-
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit					10	10	100
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	1	1	100	1	1	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2023

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja disajikan dengan membandingkan target dan realisasi indikator program/kegiatan/sub kegiatan mulai tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan periodisasi Renstra antara tahun 2021 dan 2022. Capaian kinerja Renja Tahun 2021 tidak disajikan dalam tabel karena masuk dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja periode Tahun 2016 – 2021 sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap capaian target indikator tahun 2021 dan tahun 2022. Selain itu, dengan diberlakukannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penyesuaian indikator dan target kinerja kegiatan maupun sub kegiatan sehingga berbeda dengan tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama periode Renstra, sehingga capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan adalah perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

Sampai dengan tahun 2022, capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja
Kota Blitar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian (Ambil dari LKJIP)		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INDIKATOR TUJUAN										
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			70	70,5	71	67,78	-	71	71,5	
2.	Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah			2,05	2,1	2,15	-	-	2,15	2,2	
3.	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar			83,56	83,56	84,00	83,16	83,56	84,00	84,25	
II	INDIKATOR SASARAN										
1.	Persentase pencari kerja yang berkompeten			80	82	85	66	82	85	87	
2.	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan			16	18	19	30	18	19	21	
3.	Persentase Koperasi Aktif			35,6	36,7	37,8	48,9	48,9	37,8	38,8	
4.	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi			35	36	37	39	39	37	38	

[illegible]

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian (Ambil dari LKJIP)		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha			1,8	1,85	1,9	1,82	1,85	1,9	1,95	
	Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital			2,2	2,3	2,4	2,19	2,3	2,4	2,5	
10.	Program Pengembangan UMKM										
	Persentase Wira Usaha Baru yang berhasil dikembangkan			1,6	1,7	1,8	1,78	1,78	1,8	1,9	
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81,00	81,50	82,00	82,00	82,50	82,00	82,50	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2023

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, disajikan data capaian kinerja indikator tahun lalu 2022 dan 2023 serta capaian Renja Tahun 2024 yang dituliskan sebagai perkiraan atau proyeksi capaian. Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2023 masih disajikan data proyeksi karena tahun 2023 masih dalam proses pelaksanaan.

Beberapa langkah dan strategi yang diupayakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam mencapai kinerja dengan maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas bersama Perangkat Daerah dalam proses pencapaian target kinerja;
- b. Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja pembangunan;
- c. Melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur koperasi dan tenaga kerja agar lebih efektif dalam mengawal perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selaku Pembina koperasi, UKM dan tenaga kerja di daerah, dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut.

- a. Sumberdaya manusia aparatur dan peran Usaha Mikro belum optimal untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro ;
- b. Belum adanya data base Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga kerja yang akurat , sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ;
- c. Belum meratanya Kompetensi aparatur pembina ;
- d. Perubahan peraturan Perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah ;
- e. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
- f. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk sektor koperasi, Usaha Mikro serta pelaku usaha informal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran, didukung melalui program Blitar Keren, pelatihan usaha bagi PMKS dan pelatihan kepada pencari kerja;
- 2) Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi, didukung melalui Program satu kelurahan dua wirausaha, pendampingan usaha mikro, usaha perdagangan dan IKM berbasis digital, serta pengembangan wisata Komplek MBK;

- 3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, di antaranya melalui Program Kota Blitar dalam Satu Genggaman, Mall Pelayanan Publik, dan penguatan reformasi birokrasi;
- 4) Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia, yaitu melalui konvergensi Stunting dan peningkatan sarana prasarana di bidang pendidikan, kesehatan maupun olahraga;
- 5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi melalui perencanaan “Blitar In The Night”, revitalisasi jaringan drainase dan rumah tidak layak huni, Gerakan masyarakat peduli kelola sampah (Gempita), dan mitigasi bencana berbasis masyarakat; dan
- 6) Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis, didukung dengan penguatan Kota Setara Gender, SERENADA, Sekoper Ceria, Jumat/Minggu Berkah dan Penguatan kampung Pancasila.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel di bawah :

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD: Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	48 %	1.999.999.700	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	48 %	1.999.999.700	Sumber Dana dari DBHCHT
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan terlatih	85 %	1.999.999.700	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan terlatih	85 %	1.999.999.700	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	175 orang	1.999.999.700	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yg mendapat pelatihan berbasis kompetensi	175 orang	1.999.999.700	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	81 %	376.885.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	81 %	232.772.300	Penyesuaian standart harga
			Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	16 %			Kota Blitar	Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	16 %		
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota		Jumlah pencari kerja terdaftar	230 orang	53.090.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota		Jumlah pencari kerja terdaftar	230 orang	23.691.300	Penyesuaian standart harga
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Blitar	Jumlah pencaker yg mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	53.090.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	Kota Blitar	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dll untuk peningkatan kompetensi	50 orang	23.691.300	Penyesuaian standart harga
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui nformasi pasar kerja	33,3 %	323.795.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui nformasi pasar kerja	33,3 %	209.081.000	Penyesuaian standart harga
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	120 orang	55.125.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	120 orang	83.324.600	Penyesuaian standart harga
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	46 orang	268.670.000	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	46 orang	125.756.400	Penyesuaian standart harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Blitar	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100 %	205.800.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Blitar	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100 %	175.999.300	Penyesuaian standart harga
	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	85 perusahaan	205.800.000	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	85 perusahaan	175.999.300	Penyesuaian standart harga
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	157.500.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	102.554.200	Penyesuaian standart harga
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 perkara	22.050.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 perkara	1.095.200	Penyesuaian standart harga
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Blitar	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	4 asosiasi dan serikat pekerja	26.250.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Blitar	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	4 asosiasi dan serikat pekerja	72.349.900	Penyesuaian standart harga
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Blitar	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	24 %	293.945.300	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Blitar	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	24 %	293.945.300	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 unit usaha	293.945.300	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 unit usaha	293.945.300	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 unit usaha	293.945.300	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 unit usaha	293.945.300	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	35 %	18.685.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	35 %	18.685.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Blitar	Persentase koperasi,	30 %	18.685.000	Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Blitar	Persentase koperasi,	30 %	18.685.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koperasi, KSP/USP Koperasi yg WilayahKeanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota		KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi			Koperasi, KSP/USP Koperasi yg WilayahKeanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota		KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi			
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 unit usaha	18.685.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 unit usaha	18.685.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	31 %	65.705.300	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	31 %	65.705.300	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	100 %	65.705.300	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	100 %	65.705.300	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	100 unit usaha	65.705.300	Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan		Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	100 unit usaha	65.705.300	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Blitar	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	37,1 %	495.370.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Blitar	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	37,1 %	495.370.000	Sumber Dana DAK Non Fisik PK2UKM dan APBD
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	5 %	495.370.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	5 %	495.370.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	495.370.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	495.370.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	36 %	391.764.311	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	36 %	391.764.311	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	13 %	391.764.311	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	13 %	391.764.311	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 orang	374.984.511	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	30 orang	374.984.511	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, & Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Keluarga yg Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dlm Peningkatan Taraf Hidup KeluargamelaluiKehidupan Berkoperasi & Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 keluarga	16.779.800	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	10 keluarga	16.779.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	1,9 %	843.411.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	1,9 %	843.411.000	
			Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,4 %				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,4 %		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Blitar	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100 %	843.411.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Blitar	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan)	100 %	843.411.000	
		Kota Blitar	Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100 %			Kota Blitar	Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100 %		
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	1 dokumen	195.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	10.000 unit usaha	195.000.000	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	50 unit usaha	295.244.800	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	50 unit usaha	295.244.800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 orang	111.046.200	Pemulihan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 unit usaha	111.046.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usah Mikro dan Kewirausahaan	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 orang	242.120.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 orang	242.120.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1, 8 %	426.320.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1,8 %	426.320.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Blitar	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	100 %	426.320.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Blitar	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	100 %	426.320.000	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	426.320.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	426.320.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	4.842.661.985	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	4.842.661.985	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%penyusunandokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	100 %	39.739.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%penyusunandokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	100 %	39.739.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5 dokumen	6.356.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5 dokumen	6.356.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Lap Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	33.383.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Lap Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	33.383.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.751.891.785	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.751.891.785	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	27 orang/bln	3.746.871.585	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	27 orang/bln	3.746.871.585	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tunjangan ASN					Tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.020.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.020.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	100 %	94.743.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	100 %	94.743.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	49.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	49.200.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU-an	50 orang	45.543.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU-an	50 orang	45.543.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	317.403.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	317.403.600	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	1 paket	5.084.500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	1 paket	5.084.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	2 paket	29.108.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	2 paket	29.108.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	1 paket	11.654.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	1 paket	11.654.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	22.585.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	22.585.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	24.998.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	24.998.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 dokumen	5.400.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	217.423.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	217.423.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.150.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.150.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100 %	340.483.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100 %	340.483.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67.948.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67.948.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	272.534.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	272.534.400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	110.421.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	110.421.900	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	23.112.500	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	23.112.500	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	87.309.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	87.309.400	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	Penyesuaian kebutuhan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	187.978.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	187.978.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	11 unit	101.531.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	11 unit	101.531.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	15 unit	5.400.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	15 unit	5.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	19.247.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	19.247.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	61.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	61.800.000	
					9.786.654.196					9.786.654.196	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan pogram kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi, perangkat daerah juga berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Untuk tahun perencanaan 2024, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tidak mendapat usulan dari Musrenbang Kecamatan maupun dari pokok – pokok pikiran DPRD.

Tabel. 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2023

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk menerjemahkan tema besar tersebut, Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional Tahun 2024 :

1. Prioritas Nasional 1:
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Prioritas Nasional 2:
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional 3:
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional 4:
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Prioritas Nasional 5:
Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Prioritas Nasional 6:
Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Prioritas Nasional 7:
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Renstra 2022	Realisasi 2022	Target Kinerja Renstra 2023	Target Kinerja Renstra 2024
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70	67,78	70,50	71,50
Meningkatnya nilai tambah bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2,05	2,05	2,1	2,15
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,38 (A)	83,16 (A)	83,56 (A)	84 (A)

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023

Tabel. 3.2.
Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	2022		2023	2024
					Target	Realisasi	Target	Target
1	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	80	80	81	81	82	85
2	Meningkatnya Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Koperasi Aktif	Prosentase Koperasi Aktif	20%	20%	21%	22	36,7	37,8%
4	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	31%	31%	32%	33%	36%	37%
5	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,7%	1,67%	1,72%	1,8%	1,85%	1,90%
6	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	1%	1%	1,5%	1,6%	1,75%	1,90%
7	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			83,38 (A)	83,16 (A)	83,56 (A)	84 (A)

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel . 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mendukung pencapaian SPM atau IKK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%penyusunandokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU-an	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	URUSAN TENAGA KERJA		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yg mendapat pelatihan berbasis kompetensi	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	
		Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		kerja online	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dll untuk peningkatan kompetensi	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	
	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	
	URUSAN KOPERASI UKM		
	PROGRAM PELAYANAN IZIN	Persentase	Mendukung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	USAHA SIMPAN PINJAM	Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	pencapaian Tupoksi
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg Wilayah Keanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	
	Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Perkoperasian	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	
	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan)	
		Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	
	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA
KERJA KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi”, dijabarkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut.

- 1. Prioritas Daerah 1:
Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
- 2. Prioritas Daerah 2:
Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi
- 3. Prioritas Daerah 3:
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
- 4. Prioritas Daerah 4:
Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia
- 5. Prioritas Daerah 5:
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi
- 6. Prioritas Daerah 6:
Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung
Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada	Blitar Makmur	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	• Memuat program unggulan inovatif Satu Kelurahan, Dua Wirausaha Baru dan Blitar Start-up Community Satu Kelurahan, Dua	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
ekonomi kreatif			Wirausaha Baru berupaya menciptakan dan menumbuhkan wirausaha dari setiap kelurahan yang dimulai dari perlombaan gagasan wirausaha inovatif kemudian difasilitasi hingga menjadi usaha yang berkembang. Program ini bertujuan semakin menumbuhkan industri kreatif dan kampung kreatif	Usaha Mikro (UMKM)	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			• Blitar Start-Up Community mengambil peran fasilitasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas start-up agar semakin tumbuh dan berkembang dalam penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam menjalankan usaha, serta penguatan ruang dan akses e-commerce.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2022
pada Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan pencapaian telah sesuai target yang ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan tahun selanjutnya	Secara berkala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja IKD, IKU dan IKK sampai dengan sub kegiatan untuk memastikan pencapaiannya	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2.	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan	Menyampaikan rekomendasi hasil kajian penelitian dan pengembangan kepada Walikota dan <i>stakeholder</i> terkait.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
		Mempublikasikan hasil kajian penelitian dan pengembangan secara terpadu melalui diseminasi kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sumber : LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2022, diolah

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jumlah program yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2024 adalah 4 program, 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.786.654.196,00			9.786.654.196,00		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.408.771.300,00			2.408.771.300,00		
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja		48 %	1.999.999.700,00		49%	1.999.999.700,00		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih		85 %	1.999.999.700,00		87%	1.999.999.700,00		
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n		175 orang	1.999.999.700,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	150 orang	1.999.999.700,00		
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-Persentase pencari kerja yang ditempatkan -Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online		81 % 16 %	232.772.300,00		82% 18%	232.772.300,00		
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar		230 orang	23.691.300,00		260 orang	23.691.300,00		
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi		12 orang	23.691.300,00	APBD	50	23.691.300,00		
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang melamar kerja melalui informasi pasar kerja		33,3 %	209.081.000,00		35,4%	209.081.000,00		
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		120 orang	83.324.600,00		130 orang	83.324.600,00		
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		35 orang	125.756.400,00		46 Orang	125.756.400,00		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN	Persentase perselisihan		100 %	175.999.300,00		100%	175.999.300,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
					INDUSTRIAL	industrial yang diselesaikan								
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama		85 perusahaan	175.999.300,00		90 perusahaan	175.999.300,00		
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		5 perkara	102.554.200,00		5 perkara	102.554.200,00		
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		4 perkara	1.095.200,00	APBD	5 perkara	1.095.200,00		
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	72.349.900,00		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	72.349.900,00		
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.377.882.896,00			7.377.882.896,00		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82 indeks	4.842.661.985,00		82,50	4.842.661.985,00		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	39.739.600,00		100%	39.739.600,00		
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	6.356.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	5 dokumen	6.356.000,00		
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan	33.383.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4 laporan	33.383.600,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.751.891.785,00		100%	3.751.891.785,00		
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27 orang/ bulan	3.746.871.585,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	27 orang/bulan	3.746.871.585,00		
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 laporan	5.020.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 laporan	5.020.200,00		
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	94.743.000,00		100%	94.743.000,00		
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 paket	49.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 paket	49.200.000,00		
2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		55 orang	45.543.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	55 orang	45.543.000,00		
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	317.403.600,00		100 %	317.403.600,00		
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	5.084.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 paket	5.084.500,00		
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	29.108.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 paket	29.108.000,00		
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	11.654.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 paket	11.654.600,00		
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 paket	22.585.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	10 paket	22.585.000,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	24.998.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 paket	24.998.500,00		
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	5.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 dokumen	5.400.000,00		
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	217.423.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 laporan	217.423.000,00		
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen	1.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 dokumen	1.150.000,00		
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 persen	110.421.900,00		100 persen	110.421.900,00		
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25 unit	23.112.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	35 unit	100.000.000,00		
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit	87.309.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 unit	25.000.000,00		
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar		100 %	340.483.200,00		100 %	340.483.200,00		
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	67.948.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 laporan	67.948.800,00		
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	272.534.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 laporan	272.534.400,00		
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	187.978.900,00		100 %	187.978.900,00		
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 unit	101.531.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	11 unit	101.531.400,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		15 unit	5.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	0,00		
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 unit	19.247.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3 unit	19.247.500,00		
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	61.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 unit	61.800.000,00		
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan		24 %	293.945.300,00		25%	293.945.300,00		
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan		3 unit usaha	293.945.300,00		3 unit usaha	293.945.300,00		
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		10 Unit Usaha	293.945.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	10 Unit Usaha	293.945.300,00		
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi		35 %	18.685.000,00		36%	18.685.000,00		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi		30 %	18.685.000,00		31%	18.685.000,00		
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		90 Unit Usaha	18.685.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	90 Unit Usaha	18.685.000,00		
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)		31 %	65.705.300,00		32%	65.705.300,00		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi		100 %	65.705.300,00		100 %	65.705.300,00		
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian		100 Unit Usaha	65.705.300,00	DANA TRANSFER	100 Unit Usaha	65.705.300,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
					Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kesehatan				UMUM-DANA BAGI HASIL				
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi		37,1 %	495.370.000,00		37,8%	495.370.000,00		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan		5 %	495.370.000,00		5 %	495.370.000,00		
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		150 orang	495.370.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	150 orang	495.370.000,00		
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha		36 %	391.784.311,00		38 %	391.784.311,00		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi		13 %	391.784.311,00		14 %	391.784.311,00		
2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya		10 Unit Usaha	16.799.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	10 Unit Usaha	16.799.800,00		
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		30 Unit Usaha	374.984.511,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	30 Unit Usaha	374.984.511,00		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital -Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha		2,4 % 1,9 %	843.411.000,00		2,5 % 1,95 %	843.411.000,00		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2 -Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan		100 % 100 %	843.411.000,00		100 % 100 %	843.411.000,00		
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		50 Unit Usaha	295.244.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	50 Unit Usaha	295.244.800,00		
2	17	07	2.01	0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		25 Unit Usaha	111.046.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	25 Unit Usaha	111.046.200,00		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		9000 Unit Usaha	195.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	9000 Unit Usaha	195.000.000,00		
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		50 Orang	242.120.000,00	APBD	50 Orang	242.120.000,00		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Wira Usaha Baru yang berhasil dikembangkan		1,8 %	426.320.000,00		1,9 %	426.320.000,00		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan Pendampingan		100 %	426.320.000,00		100 %	426.320.000,00		
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		100 Unit Usaha	426.320.000,00	APBD	100 Unit Usaha	426.320.000,00		

Sumber : Dinas Koperasi, MBOTEUKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2023

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun. Upaya optimalisasi kinerja di Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sekaligus dapat mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 mengikuti kaidah evaluasi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pembinaan yang semakin kompleks, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas pembinaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembinaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah maupun stakeholder harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur koperasi dan usaha mikro dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur koperasi dan usaha mikro
- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.